

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

Adrian Sutedi. *Hukum Hak Tanggungan*. Sinar Grafika. Jakarta, 2012.

\_\_\_\_\_. *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*. BP. Cipta Jaya. Jakarta, 2006.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

A.P Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999.

Achmad ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Toko Gunung Agung. Jakarta, 2022.

Budi Untung. *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris Dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*. Andi, Yogyakarta, 2015.

Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya. Bandung, 2013.

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta, 2010.

Djaja S. Meliala. *Hukum Peradata Dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia. Bandung, 2014.

Dominikus Rato. *Filsafat Hukum Mencari : Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo. Yogyakarta, 2010.

H.M Arba dan Diman Ade Mulada, *Hukum Hak Tanggungan : Hak tanggungan Atas Tanah Dan Benda-Benda Di Atasnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Habib Adjie. *Pemahaman Terhadap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)*. Mandar Maju. Bandung, 2019.

\_\_\_\_\_. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cetakan 4. Reflika Aditama, Bandung, 2008.

- \_\_\_\_\_, *Hukum Notaris Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung; PT.Refika Aditama, 2008.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti. Jakarta, 1998.
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta, 2017.
- J. Satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
- I Dewa Gede Admadja dan Nyoman Putu Budhiarta. *Teori-Teori Hukum*. Setara Press. Malang. 2018.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. 2008.
- Cst Kansil. Kristine dan S.T Kansil. Engelian R. Palendeng Dan Godlieb N Mamahit. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta. 2009.
- Firzhal Arzhi Jiwantara dan Ikang Satrya Medyantara. *Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Praktek*. Guepedia. Indonesia. 2020.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. PT. Bumi Aksara. Jakarta. 2005.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1968.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Salim HS, *Peraturan Jabatan & Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

Urip Santoso, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Prenada Media Grub, Jakarta, 2010.

Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.

Samsaimun, *Peraturan Jabatan PPAT : Pengantar Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2008.

Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta , 2008.

Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Etty Mulyati, *Kredit Perbankan : Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2016.

Henny Tanuwidjaja, *Pranata Hukum Jaminan Utang Dan Sejarah Lembaga Hukum Kenotariatan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.

Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.

M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jainan Kredit Perbankan Indionesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah dan Rumah Susun, Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Telah Diubah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

### **C. Jurnal dan Tesis**

Abuzayid Bustami, *Peranan Pejabat Pembuat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah*, Volume 18 Nomor 2, Bulan Mei 2020.

Azmi Fendri dan Busyra Azheri. *Fundamental Principles Of Mineral And Coal Resources Management In The Regional Autonomy Era*. Kanun. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 24, No. 3 (December, 2022).

Erna Sriyatmi, *Kebijakan Kementerian ATR/BPN Sebagai Upaya Peningkatan Prinsip Kehati-Hatian Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Selaku Pelaksana*

*Pendaftaran Tanah, Disampaikan Dalam Grading Dan Rakerwil IPPAT Pengwil Kalsel Tahun 2017.*

Marindowati, *Pendaftaran Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 No. 1, Januari-April 2007.

Ni Ny Mariadi dan I Komang Kawi Arta, *Efektivitas Pengurusan Hak Tanggungan Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng*, Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora , Vol. 5, No. 3, 2021.

Zidna Aufima, *Peran PPAT Selaku Pengguna Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik*, ISSN 1907-6479 JJR 22 (2) December 2020.

St. Nurjannah, *Eksistensi Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah (Tinjauan Pendaftaran filosofis)*, Jurisprudensie , Volume 5 Nomor 1 Juni 2018.

Siti Romlah, Eka Putri Fauzia Ikromi, dan Fairuz Zahirah Zihni Hamdan, *Keterlambatan Penyampaian Dokumen Peralihan Hak Atas Tanah Kepada Kantor Pertanahan Selama Pandemi Covid 19*, Notaire, Vol. 5 No. 2, Juni 2022.

Lysanza Salawati, Abdul Manan, dan Dhody A.R Widjajaatmadja, *Akibat Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Karena Adanya Gugatan Terkait Dokumen Palsu Dan Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta*, Vol. 9 No. 3 (2022).

Viona Ansila Domini, *Tanggung Jawab Notaris/Ppat Terhadap Keabsahan Tanda Tangan Dan Identitas Penghadap Dalam Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 10/Pid/2018/Pt.Dki)*, Universitas Indonesia, 2020.

Rizky Amelya Wirasti, *Pertanggung Jawaban Kantor Pertanahan Atas Kendala Dan Sistem Pemasangan Hak Tanggungan Elektronik*, Officium Notarium, No. 2 VOL. 1 Agustus 2021.

I Putu Asa Jania dan I Made Dedy Priyanto, *Kedudukan Hukum Pemilik Jaminan Dan Debitur Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Yang Terintegrasi Secara*

*Elektronik, Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06, No. 01 Maret 2021.

Pandam Nurwulan, *Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Bagi Kreditur Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 1, Vol. 28 Januari 2021: 183-202.

Agata Tri Putri Margaret dan Sapardiyono, *Pelaksanaan Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik*, *Widya Bhumi*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2021.

Ni'matul Huda, *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan PerundangUndangan*, *Jurnal Hukum* Vol. 13 No. 1, Januari 2006.

Retno Saraswati, *Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Media Hukum*, Vol. IX, No. 2, April-Juni 2009.

Syaron Brigitte Lataenda, Florence Daicy J. Lengkong, dan Joorie M Ruru, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, *Jurnal Administrasi Publik* Volume 04 No. 048.

Ulthri Aurora, *Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Di Kota Pariaman*, Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Padang, 2019.

Maria Nadea Ambarsari dan I Gusti Ngurah Darma Laksana, *Peranan Notaris/PPAT Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Glanyar*, *Journal Ilmu Hukum* Vol. 7. No. 10, 2019.

Putri Wulandari, *Tanggung Jawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Bersertifikat Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta PPAT (Studi Pada PPAT Di Kabupaten Dharmasraya*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2016.

Boedi Harsono, *PPAT Sejarah Tugas Dan Kewenangan*, *Majalah Renvoi*, No. 844.IV, Jakarta, 2007.

Ferika Rahmatul Zulfa, *Analisis Yusidis Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021.

Rissa Fajriani, *Implementasi Pendaftaran Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Di Kota Bukit Tinggi*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022.

Jhon Antonius, *Problematika Jangka Waktu Pendaftaran Hak Tanggungan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Hak-Hak Kreditur (Studi Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah)*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010.

Sulistiani dan Jawade Hafids, *Kerjasama Notaris-PPAT Terhadap Bank Di Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan*, Jurnal Akta Vol. 4 No. 4 Desember 2017.

Surya Harinata, *Akibat Hukum Lewatnya Batas Waktu Kewajiban Mendaftarkan APHT Oleh PPAT*, Cyaliptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 3, No. 2 (2014).

Tagor Mulya Paranduri, *Peran PPAT Dalam Proses Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020*, Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Umsu Vol. 1, No. 1 Januari-juni 2022.

#### **D. Website**

<http://repository.uin-suska.ac.id/7086/4/BAB%20III.pdf>.

<https://eprints.umm.ac.id/37516/3/jiptummpp-gdl-sahidinnas-50983-3-babii.pdf>

<http://repository.uinbanten.ac.id/7153/4/BAB%20II-1.pdf>.

<https://www.Maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/53758>.